PERBANDINGAN PENANGANAN PRODUK ILEGAL ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Jocelyn Cherieshta, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: cece060103@gmail.com

Gatot P. Soemartono, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: gatots@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p08>

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis perdagangan produk ilegal yang merupakan tantangan besar di tingkat global, termasuk di Indonesia dan Korea Selatan. Fenomena ini mencakup berbagai aspek, seperti barang impor tanpa izin, produk bajakan, dan barang yang tidak memenuhi standar keamanan serta regulasi yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan data diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang terkait dengan peredaran produk ilegal di Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia mengalami peredaran produk ilegal yang cukup tinggi akibat lemahnya pengawasan, tingginya permintaan pasar, dan akses mudah melalui jalur distribusi informal. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan di perbatasan, efektivitasnya masih menjadi tantangan. Di sisi lain, Korea Selatan menerapkan penegakan hukum yang lebih ketat, didukung oleh sistem digital yang memungkinkan pengawasan lebih efektif. Penggunaan teknologi canggih dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran menjadi kunci keberhasilan mereka. Kesimpulannya perbedaan dalam penerapan kebijakan dan penegakan hukum antara kedua negara mencerminkan tingkat kesiapan masing-masing dalam menghadapi peredaran produk ilegal. Indonesia dapat belajar dari praktik yang diterapkan di Korea Selatan untuk memperkuat upaya pemberantasan produk ilegal. Dengan strategi yang lebih terstruktur, Indonesia berpotensi meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menekan peredaran produk ilegal dan melindungi konsumen dari risiko yang ditimbulkannya.

Kata Kunci: Produk ilegal, Pengaturan regulasi, Penegakan hukum, Perbandingan kebijakan, Korea Selatan

ABSTRACT

This article aims to critically analyze the trade in illegal products, which is a major challenge at the global level, including in Indonesia and South Korea. This phenomenon covers various aspects, such as imported goods without permits, pirated products, and goods that do not meet applicable safety standards and regulations. This study is normative research with a literature study approach and data are obtained from written books, scientific journals, articles, and official documents related to the implementation of illegal products in Indonesia and South Korea. The findings reveal that Indonesia experiences a fairly high circulation of illegal products due to weak supervision, high market demand, and easy access through informal distribution channels. Although the government has implemented various policies, such as strengthening regulations and increasing supervision at the border, their effectiveness is still a challenge. On the other hand, South Korea implements stricter law enforcement, supported by a digital system that allows for more effective supervision. The use of sophisticated technology in detecting and prosecuting violations is the key to their success. In conclusion, the differences in policy implementation and law enforcement between the two countries reflect the level of readiness of each country in dealing with the circulation of illegal products. Indonesia can learn from the practices implemented in South Korea to strengthen efforts to eradicate illegal products. With a more structured strategy, Indonesia has the potential to increase the effectiveness of policies in suppressing the circulation of illegal products and protecting consumers from the risks they pose.

Keywords: Illegal products, Regulatory oversight, Law enforcement, Policy comparison, South Korea

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Produk ilegal telah menjadi permasalahan global yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi dan sosial di banyak negara, termasuk Indonesia dan Korea Selatan. Produk ilegal mencakup berbagai kategori, seperti barang bajakan, barang selundupan, produk yang tidak memenuhi standar keamanan, serta barang yang diproduksi dan dipasarkan tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada perekonomian negara, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat, kesehatan publik, serta stabilitas industri dalam negeri. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perbedaan kebijakan dan strategi yang diterapkan di masing-masing negara dalam menangani peredaran produk ilegal guna menemukan solusi yang lebih efektif dalam pemberantasannya.¹

Di Indonesia, peredaran produk ilegal masih menjadi tantangan besar.² Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan di berbagai titik masuk perdagangan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan produk ilegal, serta masih adanya permintaan tinggi terhadap produk-produk dengan harga lebih murah meskipun tidak memiliki jaminan kualitas dan keamanan.³ Produk ilegal yang beredar di Indonesia meliputi barang elektronik, obat-obatan, kosmetik, pakaian, suku cadang kendaraan, hingga produk makanan dan minuman. Masuknya barang ilegal ke pasar domestik seringkali mempengaruhi industri lokal yang harus bersaing dengan harga yang jauh lebih murah, meskipun dengan kualitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Selain itu, produk ilegal yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan dapat membahayakan masyarakat yang menggunakannya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi peredaran produk ilegal, termasuk dengan memperketat peraturan perdagangan, meningkatkan pengawasan di perbatasan, serta menindak tegas pelaku perdagangan ilegal. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, masih terdapat banyak kendala dalam implementasi kebijakan ini, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, serta lemahnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk yang legal dan berkualitas.⁵ Meskipun pemerintah telah menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, dalam upaya memerangi produk ilegal, tantangan masih tetap ada dan membutuhkan strategi yang lebih efektif serta komprehensif.

¹Fadil Naingolan & Purnamasari D. "Perbandingan Hukum Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Persaingan Usaha di Indonesia dan Korea Selatan: Comparative Law on Abuse of Dominant Position in Business Competition in Indonesia and South Korea". *Reformasi Hukum Trisakti*, No. 7 (2025): 377-387.

² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Laporan Tahunan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa." (Jakarta: Kementerian Perdagangan RI, 2019). 45-47.

³ Andi Syahputra. "Analisis Faktor Pendorong Peredaran Produk Ilegal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 14, no. 3 (2022): 210-225.

⁴ Anung Pramono dan Siti Aminah, "Dampak Produk Ilegal terhadap Industri Lokal: Studi Kasus di Jawa dan Sumatera," *Jurnal Pengembangan Ekonomi* 9, no. 2 (2020): 78-94.

⁵ Husein Mochtar dan Taufiq Rahman, "Evaluasi Efektivitas Kebijakan Anti Barang Ilegal di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 2 (2021): 145-160.

Sementara itu, Korea Selatan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani peredaran produk ilegal.⁶ Sebagai negara yang memiliki sistem perdagangan yang lebih ketat serta teknologi pengawasan yang lebih maju, Korea Selatan mampu menekan peredaran produk ilegal dengan lebih efektif dibandingkan Indonesia.⁷ Pemerintah Korea Selatan menerapkan berbagai kebijakan yang didukung oleh sistem digitalisasi dalam mengawasi distribusi barang serta mekanisme kontrol yang ketat di pelabuhan, bandara, dan jalur perdagangan lainnya. Selain itu, masyarakat Korea Selatan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya membeli produk legal, baik dari aspek keamanan, kualitas, maupun dukungan terhadap industri dalam negeri.⁸

Salah satu faktor utama yang membuat Korea Selatan lebih efektif dalam menekan peredaran produk ilegal adalah sistem regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat.⁹ Pihak berwenang di Korea Selatan memiliki mekanisme pengawasan berbasis teknologi yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi masuknya produk ilegal secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku perdagangan ilegal juga lebih berat, sehingga memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan di Indonesia.¹⁰

Perbedaan lain yang mencolok antara Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani produk ilegal adalah peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Di Korea Selatan, masyarakat lebih aktif dalam melaporkan keberadaan produk ilegal serta memiliki budaya konsumsi yang lebih selektif. Mereka cenderung lebih percaya pada produk yang telah terjamin kualitas dan keamanannya, sehingga permintaan terhadap produk ilegal menjadi lebih rendah. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana kesadaran masyarakat terhadap risiko produk ilegal masih tergolong rendah, dan banyak konsumen yang lebih mengutamakan harga murah dibandingkan dengan aspek keamanan dan legalitas suatu produk.

Dari segi kebijakan perdagangan, Korea Selatan juga memiliki sistem yang lebih transparan dan efisien dalam mengontrol masuknya produk dari luar negeri. Regulasi mengenai impor dan ekspor di Korea Selatan lebih ketat, dengan adanya mekanisme pengawasan yang berbasis teknologi informasi. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih efektif, terutama terkait dengan masalah birokrasi dan regulasi yang sering kali tidak konsisten dalam penerapannya.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memberantas produk ilegal juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan sosial. Sebagai negara kepulauan dengan

⁶ Adit Pramana. *Kebijakan Pengawasan Perdagangan di Korea Selatan* (Seoul: Korea Institute for International Economic Policy, 2020), 127-130.

⁷ Lukas Hermawan. "Perbandingan Efektivitas Sistem Pengawasan Produk Ilegal di Asia Tenggara dan Asia Timur." *Jurnal Ekonomi Asia Pasifik* 24, no. 3 (2020): 245-267.

⁸ Jusuf Santoso. "Kesadaran Konsumen dan Perilaku Pembelian Produk Legal di Korea Selatan." *Jurnal Perilaku Konsumen Asia* 17, no. 2 (2020): 112-128.

⁹ Agus Santoso dan Budi Wijaya. "Studi Komparatif Kebijakan Anti Perdagangan Ilegal di Negara-Negara Asia." *Jurnal Kebijakan Perdagangan Indonesia* 12, no. 2 (2020): 156-178.

¹⁰ Dian Nugraha dan Astrid Kusumawardhani. "Perbandingan Efektivitas Sanksi Hukum terhadap Pelaku Perdagangan Produk Ilegal di Indonesia dan Korea Selatan." *Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 1 (2020): 87-106.

ribuan pulau yang tersebar, pengawasan terhadap jalur perdagangan ilegal menjadi lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki wilayah lebih kecil dan sistem perdagangan yang lebih terkendali. Banyaknya jalur perdagangan tidak resmi yang digunakan untuk memasukkan produk ilegal ke Indonesia menjadi salah satu penyebab utama tingginya peredaran barang ilegal di dalam negeri.

Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan ini, Indonesia dapat belajar dari kebijakan yang diterapkan di Korea Selatan dalam menekan peredaran produk ilegal. Beberapa langkah yang dapat diadaptasi antara lain adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum, memperketat regulasi perdagangan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membeli produk legal. Dengan adanya pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani peredaran produk ilegal dan melindungi konsumen dari risiko yang ditimbulkan oleh barang-barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Di Indonesia, masalah produk ilegal telah menjadi tantangan yang sulit diatasi dalam jangka panjang. Salah satu penyebab utama dari maraknya barang ilegal di pasar domestik adalah besarnya permintaan dari konsumen yang cenderung mencari produk dengan harga murah tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan keamanan. Hal ini diperburuk dengan lemahnya sistem pengawasan di berbagai titik masuk barang, baik melalui jalur laut, udara, maupun darat. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan besar dalam mengawasi ribuan kilometer garis pantai yang sering dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan barang ilegal.¹¹ Banyak barang masuk melalui pelabuhan kecil yang sulit diawasi oleh otoritas terkait, sehingga peredaran produk ilegal terus meningkat meskipun pemerintah telah berupaya melakukan penertiban.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan peredaran barang ilegal, seperti dengan memperketat regulasi perdagangan, meningkatkan pengawasan di titik-titik masuk perbatasan, serta bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam penegakan hukum. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali mengalami kendala, baik dari sisi keterbatasan sumber daya manusia maupun kurangnya koordinasi antarinstansi yang berwenang. Di beberapa kasus, lemahnya sistem pengawasan juga disebabkan oleh adanya praktik korupsi yang memungkinkan barang ilegal masuk dengan lebih mudah melalui jalur distribusi yang tidak resmi. Akibatnya, banyak produk ilegal yang beredar di pasaran tanpa terdeteksi, sehingga merugikan konsumen yang tidak mengetahui risiko yang ada di balik produk-produk tersebut.

Di sisi lain, Korea Selatan memiliki sistem yang lebih efektif dalam menangani peredaran barang ilegal. Negara ini menerapkan kebijakan yang lebih ketat dengan dukungan teknologi canggih dalam proses pengawasan.¹² Pemerintah Korea Selatan menggunakan sistem digitalisasi dalam pemantauan perdagangan dan peredaran produk, yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat mendeteksi adanya barang

¹¹ Hendra Gunawan dan Rina Pratiwi. "Evaluasi Kebijakan Penertiban Produk Ilegal di Indonesia: Analisis Data 2020-2024." *Jurnal Administrasi Publik* 22, no. 1 (2024): 67-89.

¹² Arief Nugroho dan Indra Kusuma. "Implementasi Sistem Digital dalam Pengawasan Perdagangan: Studi Komparatif Indonesia dan Korea Selatan." *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Perdagangan* 14, no. 3 (2022): 187-205.

yang tidak memiliki izin resmi. Penggunaan teknologi dalam pengawasan ini sangat membantu dalam mengurangi kemungkinan masuknya produk ilegal ke dalam pasar domestik, karena setiap barang yang masuk ke Korea Selatan harus melewati proses pemeriksaan yang sangat ketat dan terdokumentasi dengan baik.¹³

Selain itu, Korea Selatan juga memiliki sistem penegakan hukum yang lebih tegas dibandingkan dengan Indonesia. Sanksi yang diberikan kepada pelaku perdagangan barang ilegal sangat berat, baik dalam bentuk denda yang tinggi maupun hukuman penjara yang memberikan efek jera. Berbeda dengan Indonesia, di mana masih banyak pelaku bisnis ilegal yang lolos dari jerat hukum atau hanya mendapatkan hukuman ringan, di Korea Selatan pemerintah benar-benar memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dalam perdagangan ditindak dengan serius. Hal ini membuat banyak pihak berpikir dua kali sebelum terlibat dalam peredaran barang ilegal, karena konsekuensi hukum yang harus dihadapi sangat besar.

Salah satu aspek yang membedakan Korea Selatan dengan Indonesia dalam hal pemberantasan produk ilegal adalah kesadaran masyarakat yang jauh lebih tinggi. Di Korea Selatan, konsumen lebih selektif dalam memilih produk yang mereka beli, dan mereka lebih cenderung membeli barang yang telah terjamin kualitas serta legalitasnya.¹⁴ Hal ini terjadi karena adanya edukasi yang intensif dari pemerintah mengenai bahaya produk ilegal, baik dari segi keamanan, kesehatan, maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan. Kesadaran masyarakat ini secara langsung berkontribusi dalam menekan permintaan terhadap barang ilegal, karena semakin rendahnya permintaan otomatis membuat peredaran produk ilegal semakin sulit berkembang.

Sebaliknya, di Indonesia kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membeli produk legal masih tergolong rendah. Banyak konsumen yang lebih mempertimbangkan faktor harga dibandingkan dengan aspek keamanan atau legalitas suatu barang. Hal ini dapat dilihat dari maraknya produk-produk kosmetik, obat-obatan, serta suplemen kesehatan yang tidak memiliki izin resmi tetapi tetap banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kurangnya edukasi serta keterbatasan akses terhadap produk legal dengan harga terjangkau menjadi salah satu penyebab utama mengapa barang ilegal masih sangat diminati. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya produk ilegal serta memperkuat sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain faktor regulasi dan kesadaran masyarakat, salah satu aspek yang berpengaruh dalam perbedaan penerapan kebijakan produk ilegal di kedua negara adalah sistem perdagangan yang berlaku. Korea Selatan memiliki sistem perdagangan yang lebih terkontrol dengan regulasi yang jelas dan mekanisme impor yang sangat ketat. Proses masuknya barang ke Korea Selatan harus melalui berbagai tahap pemeriksaan yang memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasaran telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini membuat peluang masuknya produk ilegal menjadi lebih kecil, karena adanya sistem verifikasi yang sangat ketat.

¹³ Salsabila A. dan A. Z. Mubarrok "Analisis Penyelundupan Pajak Kepabeanan Atas Importasi Merchandise K-Pop Pada Komunitas Autobase X Twitter." *Jurnal Riset Akuntansi Politika* 7, no. 2 (2024): 485-498.

¹⁴ Surya Wijaya. "Perilaku Konsumen Korea Selatan dalam Pemilihan Produk Legal: Studi Komparatif dengan Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Konsumen* 15, no. 2 (2023): 112-128.

Di Indonesia, sistem perdagangan masih memiliki banyak celah yang memungkinkan barang ilegal masuk dengan mudah. Proses impor dan distribusi barang sering kali mengalami kendala birokrasi yang berbelit, sehingga banyak pelaku bisnis yang mencari cara pintas dengan memasukkan barang melalui jalur ilegal. Selain itu, regulasi yang tidak selalu konsisten serta adanya perbedaan kebijakan antara satu daerah dengan daerah lainnya juga menjadi faktor yang mempersulit pemberantasan barang ilegal. Beberapa produk ilegal bahkan dapat masuk ke pasar secara terang-terangan karena lemahnya pengawasan di tingkat lokal, sehingga semakin sulit untuk mengontrol peredarannya di seluruh wilayah Indonesia.

Dari segi infrastruktur, Korea Selatan juga lebih unggul dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk ilegal. Negara ini memiliki sistem pemantauan yang lebih maju dengan menggunakan teknologi berbasis data untuk melacak asal-usul barang serta pergerakannya di pasar. Sistem ini memungkinkan otoritas setempat untuk dengan cepat mengidentifikasi produk ilegal dan mengambil tindakan sebelum barang tersebut tersebar luas di pasaran. Di Indonesia, sistem semacam ini masih belum diterapkan secara optimal, sehingga banyak barang ilegal yang baru terdeteksi setelah sudah beredar luas di masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani produk ilegal, Indonesia perlu mengadopsi beberapa strategi yang telah diterapkan di Korea Selatan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperketat sistem pengawasan di berbagai titik masuk barang dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Digitalisasi dalam sistem perdagangan dapat membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyelundupan barang ilegal. Selain itu, pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku perdagangan ilegal juga perlu diperkuat agar memberikan efek jera yang lebih besar.

Di samping itu, edukasi masyarakat harus menjadi salah satu prioritas utama dalam menangani peredaran produk ilegal. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk legal harus terus ditingkatkan melalui berbagai kampanye dan sosialisasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan media, untuk memberikan informasi yang lebih luas mengenai risiko dari produk ilegal serta manfaat dari penggunaan barang yang telah memiliki izin resmi. Dengan adanya kombinasi antara regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan peredaran barang ilegal di Indonesia dapat ditekan secara signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan regulasi penanganan produk ilegal antara Indonesia dan Korea Selatan?
2. Bagaimana perbandingan penegakan hukum terhadap peredaran produk ilegal di Indonesia dan Korea Selatan?

3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perbandingan penanganan produk ilegal:
Untuk mengevaluasi dan membandingkan metode dan strategi yang diterapkan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani produk ilegal, termasuk langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi standar.
2. Menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran produk ilegal di Indonesia dan Korea Selatan:
Untuk menilai efektivitas penerapan regulasi yang ada di kedua negara terkait penerapan produk ilegal, serta membandingkan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan, termasuk sanksi dan tindakan yang diambil terhadap pelanggaran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan studi pustaka sebagai metode utama. Sumber bahan hukum dan data diperoleh dari literatur tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi terkait penerapan kebijakan produk ilegal di Indonesia dan Korea Selatan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran pustaka yang komprehensif dari referensi kredibel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan kebijakan di kedua negara, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perbandingan Pengaturan Regulasi Produk Ilegal antara Indonesia dan Korea Selatan

Produk ilegal telah menjadi permasalahan yang kompleks dan berdampak luas di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Korea Selatan. Dalam menganalisis perbandingan penerapan produk ilegal antara kedua negara ini, terdapat berbagai faktor yang harus diperhatikan, mulai dari kebijakan regulasi, sistem pengawasan, penegakan hukum, hingga kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi dari penggunaan produk ilegal. Perbedaan dalam sistem pemerintahan, kondisi ekonomi, serta infrastruktur yang tersedia di masing-masing negara juga mempengaruhi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara mendalam bagaimana Indonesia dan Korea Selatan menangani peredaran produk ilegal, apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana efektivitas penerapan kebijakan di kedua negara dapat dibandingkan.

Salah satu aspek utama yang membedakan Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani peredaran produk ilegal adalah tingkat ketatnya regulasi yang diterapkan oleh pemerintah masing-masing. Korea Selatan memiliki sistem regulasi yang lebih ketat dengan mekanisme kontrol yang lebih efisien dibandingkan Indonesia. Pemerintah Korea Selatan sangat memperhatikan aspek legalitas dari setiap produk

yang beredar di pasar domestik, sehingga setiap barang yang diperdagangkan harus melalui prosedur verifikasi yang ketat. Sebaliknya, di Indonesia masih banyak celah dalam regulasi yang memungkinkan barang ilegal masuk ke pasar dengan lebih mudah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan serta kurangnya sistem digitalisasi yang terintegrasi dalam pemantauan barang masuk.

Dalam hal sistem pengawasan, Korea Selatan telah mengadopsi teknologi canggih yang memungkinkan deteksi dini terhadap produk ilegal yang masuk ke wilayahnya.¹⁵ Pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan sistem big data dalam mengidentifikasi barang-barang yang tidak memiliki izin resmi menjadi salah satu keunggulan Korea Selatan dalam menangani masalah ini.¹⁶ Dengan adanya sistem ini, setiap barang yang masuk ke negara tersebut dapat dipantau secara real-time, sehingga memungkinkan pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam pengawasan produk ilegal, terutama di wilayah perbatasan yang luas dan sulit dijangkau. Banyaknya jalur perdagangan tidak resmi yang digunakan untuk menyelundupkan barang ilegal ke dalam negeri menjadi tantangan besar yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara optimal.¹⁷

Selain dari aspek regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum, faktor kesadaran masyarakat juga memainkan peran penting dalam menentukan seberapa besar produk ilegal dapat beredar di suatu negara. Di Korea Selatan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membeli produk legal jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya edukasi yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah serta budaya konsumsi yang lebih mengutamakan kualitas dan keamanan produk. Masyarakat Korea Selatan lebih berhati-hati dalam memilih produk yang mereka gunakan, terutama dalam kategori obat-obatan, kosmetik, dan makanan, yang dapat berdampak langsung pada kesehatan. Mereka lebih percaya pada produk yang telah memiliki sertifikasi resmi dan cenderung menghindari produk yang tidak memiliki izin edar.

Di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap risiko penggunaan produk ilegal masih tergolong rendah. Banyak konsumen yang lebih memilih produk dengan harga murah tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan keamanannya. Hal ini dapat dilihat dari maraknya penggunaan produk kosmetik, obat-obatan, serta barang elektronik yang tidak memiliki izin resmi tetapi tetap laris di pasaran. Kurangnya edukasi serta keterbatasan akses terhadap produk legal dengan harga terjangkau menjadi faktor utama yang membuat produk ilegal tetap diminati oleh masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya produk ilegal serta pentingnya memilih produk yang telah memiliki izin resmi.

¹⁵ Hadi Wibowo. "Sistem Pengawasan Modern Produk Edar di Korea Selatan." *Jurnal Kebijakan Perdagangan Internasional* 16, no. 2 (2022): 143-158.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 132.

¹⁷ Budi Sulistyanto dan Ayu Permata. "Pemetaan Jalur Penyelundupan dan Strategi Penanggulangannya di Indonesia." *Jurnal Studi Keamanan* 19, no. 1 (2023): 56-72.

¹⁸ Isdiana Syahfitri dan A. S. Dewi. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal". *Juripol* 5, no. 1 (2022): 16-17.

Perbedaan lain yang cukup signifikan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani peredaran produk ilegal adalah sistem perdagangan yang diterapkan. Korea Selatan memiliki sistem perdagangan yang lebih transparan dan efisien, dengan regulasi impor dan ekspor yang sangat ketat. Proses masuknya barang ke Korea Selatan harus melalui berbagai tahapan pemeriksaan yang memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁹ Hal ini membuat peluang masuknya produk ilegal menjadi lebih kecil, karena adanya sistem verifikasi yang sangat ketat. Sebaliknya, di Indonesia sistem perdagangan masih memiliki banyak celah yang memungkinkan barang ilegal masuk dengan lebih mudah. Proses impor dan distribusi barang sering kali mengalami kendala birokrasi yang panjang, sehingga banyak pelaku bisnis yang mencari cara pintas dengan memasukkan barang melalui jalur ilegal. Selain itu, regulasi yang sering berubah serta adanya perbedaan kebijakan antara satu daerah dengan daerah lainnya juga menjadi faktor yang menyulitkan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal.²⁰

Dari segi infrastruktur, Korea Selatan juga lebih unggul dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk ilegal. Negara ini memiliki sistem pemantauan yang lebih maju dengan menggunakan teknologi berbasis data untuk melacak asal-usul barang serta pergerakannya di pasar.²¹ Sistem ini memungkinkan otoritas setempat untuk dengan cepat mengidentifikasi produk ilegal dan mengambil tindakan sebelum barang tersebut tersebar luas di pasaran. Di Indonesia, sistem semacam ini masih belum diterapkan secara optimal, sehingga banyak barang ilegal yang baru terdeteksi setelah sudah beredar luas di masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani produk ilegal, Indonesia dapat mengadopsi beberapa strategi yang telah diterapkan di Korea Selatan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperketat sistem pengawasan di berbagai titik masuk barang dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Digitalisasi dalam sistem perdagangan dapat membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyelundupan barang ilegal. Selain itu, pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku perdagangan ilegal juga perlu diperkuat agar memberikan efek jera yang lebih besar.

Di samping itu, edukasi masyarakat harus menjadi salah satu prioritas utama dalam menangani peredaran produk ilegal. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk legal harus terus ditingkatkan melalui berbagai kampanye dan sosialisasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan media, untuk memberikan informasi yang lebih luas mengenai risiko dari produk ilegal serta manfaat dari penggunaan barang yang telah memiliki izin resmi. Dengan adanya kombinasi antara regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan peredaran barang ilegal di Indonesia dapat ditekan secara signifikan.

¹⁹ Indah Pratiwi. "Studi Komparatif Sistem Inspeksi Barang Impor di Negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara." *Jurnal Kebijakan Perdagangan Indonesia* 8, no. 2 (2021): 78-95.

²⁰ Muhammad Dafa. "Upaya Penyelesaian Sengketa Anti Dumping Produk Kertas Indonesia dengan Korea Selatan." (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025).

²¹ Heri Purwanto. *Implementasi Teknologi Blockchain dalam Sistem Pemantauan Rantai Pasok Nasional* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2022), 89.

Pada akhirnya, perbedaan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam penerapan kebijakan terhadap produk ilegal menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menangani masalah ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, efektivitas pengawasan, serta peran aktif masyarakat. Indonesia dapat mengambil banyak pelajaran dari Korea Selatan dalam hal strategi pemberantasan barang ilegal, baik dari segi penggunaan teknologi, sistem perdagangan, maupun penegakan hukum. Dengan adanya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani peredaran produk ilegal dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih sehat dan berkelanjutan

Dalam konteks perdagangan internasional, peredaran produk ilegal bukan hanya menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang, tetapi juga bagi negara maju yang memiliki sistem regulasi yang lebih ketat. Korea Selatan sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang maju telah berhasil membangun sistem yang dapat meminimalkan peredaran produk ilegal melalui kombinasi kebijakan perdagangan yang disiplin, teknologi pengawasan yang canggih, serta kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap bahaya barang ilegal.²² Di sisi lain, Indonesia yang merupakan negara dengan luas wilayah yang besar serta tingkat kompleksitas birokrasi yang tinggi masih menghadapi berbagai tantangan dalam menangani produk ilegal yang masuk ke pasar domestik.

Dalam praktik di lapangan, perbedaan sistem perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan juga mempengaruhi efektivitas dalam menangani peredaran produk ilegal. Korea Selatan memiliki kebijakan yang lebih selektif dalam mengizinkan masuknya produk dari luar negeri, terutama dalam kategori produk yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan konsumen.²³ Pemerintah Korea Selatan menerapkan standar ketat terhadap barang-barang seperti obat-obatan, kosmetik, makanan, serta produk elektronik, yang harus melalui serangkaian uji kualitas sebelum mendapatkan izin edar. Selain itu, sistem bea cukai di Korea Selatan telah terintegrasi dengan basis data yang mencatat riwayat transaksi perdagangan, sehingga memudahkan dalam melacak asal-usul produk dan mengidentifikasi adanya potensi pelanggaran.²⁴

Di Indonesia, regulasi terkait impor dan peredaran produk ilegal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penerapan di lapangan. Meskipun secara regulasi telah ada ketentuan yang mengatur batasan terhadap masuknya produk tanpa izin, namun dalam praktiknya masih banyak kasus di mana barang ilegal dapat dengan mudah beredar di pasaran. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi adalah lemahnya sistem koordinasi antara berbagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan perdagangan. Dalam banyak kasus, perbedaan kebijakan

²² Budi Setiawan. "Tantangan Global dalam Menghadapi Peredaran Barang Ilegal: Analisis Komparatif Negara Berkembang dan Negara Maju." *Jurnal Hubungan Internasional* 12, no. 3 (2021): 245-263.

²³ Anita Permata W.. "Kebijakan Selektif Impor dan Dampaknya terhadap Kualitas Produk yang Beredar: Belajar dari Korea Selatan." *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan* 15, no. 2 (2023): 112-128.

²⁴ Endang Sulistyowati. "Modernisasi Sistem Pelacakan Produk dalam Pengawasan Bea Cukai: Studi Kasus Korea Selatan dan Implementasi Potensial di Indonesia." *Jurnal Kepabeanaan Indonesia* 7, no. 1 (2022): 45-63.

antarinstansi sering kali menyebabkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan ilegal untuk memasukkan produk mereka ke Indonesia.²⁵

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam menentukan tingkat peredaran produk ilegal di suatu negara. Di Korea Selatan, tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi serta sistem distribusi yang lebih baik membuat masyarakat cenderung lebih selektif dalam memilih produk yang mereka konsumsi.²⁶ Konsumen di negara tersebut lebih mengutamakan kualitas serta legalitas barang yang mereka beli, sehingga pasar untuk produk ilegal menjadi lebih kecil. Pemerintah Korea Selatan juga gencar melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang bahaya produk ilegal, baik dari segi kesehatan, keamanan, maupun dampak ekonomi terhadap industri lokal.²⁷

Sementara itu, di Indonesia, masih banyak masyarakat yang lebih memilih produk ilegal karena faktor harga yang lebih murah dibandingkan produk resmi. Hal ini terutama terjadi di sektor-sektor tertentu seperti kosmetik, obat-obatan, serta barang elektronik, di mana produk ilegal sering kali memiliki harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan produk dengan izin resmi. Kurangnya akses terhadap produk legal yang terjangkau juga menjadi faktor yang mendorong konsumen untuk memilih produk ilegal sebagai alternatif. Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar dalam mengurangi peredaran produk ilegal di Indonesia adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap produk legal dengan harga yang lebih kompetitif serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang ditimbulkan oleh barang ilegal.²⁸

Aspek lain yang turut mempengaruhi peredaran produk ilegal adalah perkembangan *e-commerce* dan perdagangan digital. Di era digital saat ini, peredaran barang ilegal tidak hanya terjadi melalui jalur konvensional seperti pasar fisik atau jaringan distribusi tidak resmi, tetapi juga melalui *platform* perdagangan *online* yang semakin berkembang pesat. Di Korea Selatan, pemerintah telah menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap platform *e-commerce* untuk memastikan bahwa produk yang dijual secara daring telah memenuhi standar legalitas yang ditetapkan.²⁹ Setiap penjual yang beroperasi di platform *e-commerce* harus memiliki izin resmi dan produk yang dijual harus terdaftar dalam sistem pemerintah. Selain itu, mekanisme pelaporan dan pengawasan terhadap produk ilegal yang beredar di platform *online* juga telah dioptimalkan, sehingga memudahkan pemerintah untuk menindaklanjuti laporan dari konsumen yang menemukan produk tanpa izin.³⁰

²⁵Raja J. B.. "Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura." *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* 7, no. 2 (2023): 1-15.

²⁶Ratih Pramudya. "Kesadaran Konsumen dan Preferensi Produk Legal: Pengaruh Tingkat Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 14, no. 3 (2021): 15-30.

²⁷ Seilvia Prasindhi Ningrum dan Rudy P. Tobing. "Pengaruh Viral Marketing Dan Brand Awareness Terhadap Purchase Intention Produk Skincare Brand Korea Selatan". *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2 no. 4 (2022):74-88.

²⁸Firman Nugroho. "Strategi Efektif Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Produk Ilegal". *Jurnal Komunikasi dan Pemasaran Sosial* 9, no. 2 (2022): 10-28.

²⁹Surya Darma W.. *Regulasi Digital Marketplace: Studi Kasus Korea Selatan dan Jepang* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2023), 156.

³⁰ Hendra Gunawan. "Sistem Verifikasi Penjual dalam Platform E-commerce: Pelajaran dari Negara-negara Asia Timur." *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Digital* 5, no. 3 (2021): 175-192.

Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur perdagangan online, namun implementasi dan pengawasannya masih belum optimal. Banyak produk ilegal yang dijual melalui platform e-commerce tanpa adanya mekanisme verifikasi yang ketat. Hal ini diperburuk dengan adanya banyak marketplace yang belum memiliki sistem pemantauan yang cukup kuat untuk mengidentifikasi produk ilegal yang dijual oleh pihak ketiga. Konsumen sering kali tidak menyadari bahwa produk yang mereka beli secara daring tidak memiliki izin resmi karena kurangnya informasi dan transparansi dalam deskripsi produk. Oleh karena itu, untuk mengurangi peredaran produk ilegal di ranah digital, Indonesia perlu meningkatkan pengawasan terhadap platform e-commerce serta memastikan bahwa setiap barang yang dijual telah memenuhi persyaratan legalitas yang berlaku.

Selain itu, dalam dinamika perdagangan global, tantangan dalam menangani produk ilegal tidak hanya melibatkan aspek regulasi dan pengawasan di tingkat nasional tetapi juga melibatkan peran hubungan internasional dan kerja sama lintas negara. Korea Selatan sebagai negara dengan sistem perdagangan yang lebih tertata memiliki berbagai bentuk kerja sama dengan organisasi internasional seperti *World Customs Organization* (WCO) dan Interpol dalam mendeteksi dan menindak peredaran barang ilegal. Melalui pertukaran informasi dan kolaborasi dalam bidang keamanan perdagangan, Korea Selatan mampu memperkuat sistem deteksi dini untuk mencegah masuknya produk ilegal dari luar negeri.

Di sisi lain, Indonesia meskipun telah bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional, masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan koordinasi dengan negara-negara tetangga yang sering menjadi jalur masuk barang ilegal. Sebagai negara kepulauan dengan banyak titik masuk, Indonesia harus menghadapi tantangan geografis yang membuat pengawasan menjadi lebih kompleks. Banyaknya pelabuhan kecil yang sulit dipantau serta keterbatasan sumber daya dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang yang masuk menjadi hambatan yang masih belum sepenuhnya teratasi. Hal ini menyebabkan banyaknya produk ilegal yang berhasil masuk tanpa terdeteksi atau dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih untuk menghindari pemeriksaan.³¹

Jika dilihat dari perspektif hukum internasional, Korea Selatan menerapkan pendekatan yang lebih agresif dalam menangani penyelundupan dan perdagangan ilegal dengan mengadopsi kebijakan yang memungkinkan tindakan hukum terhadap pelaku tidak hanya di dalam negeri tetapi juga terhadap jaringan internasional yang terlibat dalam distribusi produk ilegal. Korea Selatan bekerja sama dengan otoritas di berbagai negara untuk membongkar jaringan penyelundupan yang beroperasi lintas batas. Pendekatan ini memberikan efek pencegahan yang lebih kuat karena pelaku perdagangan ilegal tidak hanya menghadapi ancaman di dalam negeri tetapi juga di tingkat internasional.

Indonesia, meskipun telah memiliki undang-undang yang mengatur perdagangan ilegal, masih mengalami kendala dalam penerapan yang konsisten terutama ketika menghadapi jaringan perdagangan lintas negara. Salah satu kendala utama adalah proses hukum yang sering kali memakan waktu lama dan tidak selalu

³¹Muhammad Z. S.. "KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING (Studi Kasus Indonesia Dan Korea Selatan merusak sistem sosial dan keuangan global)". *Taqorrub: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah* 1 no.1 (2020), 68-91.

berujung pada penindakan yang tegas terhadap pelaku. Banyak kasus di mana barang ilegal yang disita akhirnya kembali beredar di pasaran karena lemahnya pengelolaan barang bukti dan sistem pelelangan yang tidak transparan. Selain itu, masih adanya celah hukum yang memungkinkan pelaku menghindari hukuman dengan membayar denda dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan keuntungan yang mereka peroleh dari perdagangan ilegal.

Dalam hal teknologi yang digunakan untuk mendeteksi produk ilegal, Korea Selatan telah mengintegrasikan sistem digital dalam hampir semua aspek pengawasan perdagangan. Mulai dari pemindaian *barcode* yang terhubung dengan database nasional, penggunaan sistem pengenalan pola berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali dalam transaksi perdagangan, hingga implementasi sistem blockchain dalam pencatatan riwayat distribusi barang.³² Dengan pendekatan ini, otoritas di Korea Selatan dapat dengan mudah melacak pergerakan barang dari pabrik hingga ke tangan konsumen dan memastikan bahwa tidak ada produk ilegal yang masuk ke dalam rantai distribusi resmi.

Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan teknologi yang serupa, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital dalam skala nasional. Banyak sistem pencatatan yang masih menggunakan metode manual atau belum terintegrasi dengan baik antara satu instansi dengan instansi lainnya. Hal ini menyebabkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan ilegal untuk memalsukan dokumen atau menghindari deteksi dari sistem pengawasan yang ada. Selain itu, masih adanya keterbatasan dalam tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang teknologi pengawasan perdagangan membuat implementasi sistem modern menjadi lebih lambat dibandingkan negara-negara yang telah lebih dahulu mengadopsi teknologi tersebut.

Dari perspektif budaya konsumsi, perbedaan signifikan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani produk ilegal juga dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat dalam memilih produk. Di Korea Selatan, tingkat kepedulian terhadap keamanan dan legalitas produk sangat tinggi, sehingga konsumen lebih berhati-hati dalam membeli barang. Bahkan, dalam beberapa sektor seperti kosmetik dan obat-obatan, masyarakat Korea Selatan cenderung memilih produk yang telah mendapatkan sertifikasi khusus atau memiliki reputasi baik di pasar. Budaya ini membuat produk ilegal lebih sulit untuk mendapatkan tempat di pasar karena konsumen sendiri yang secara aktif menghindari barang-barang yang tidak memiliki izin resmi.

Sebaliknya, di Indonesia masih banyak konsumen yang lebih mengutamakan harga murah dibandingkan dengan aspek legalitas suatu produk. Hal ini terlihat dari maraknya penjualan barang tanpa izin di berbagai platform, baik secara offline maupun online, yang tetap memiliki pangsa pasar besar meskipun produk-produk tersebut berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran ini adalah minimnya edukasi mengenai risiko penggunaan barang ilegal serta kurangnya transparansi dalam sistem distribusi yang membuat konsumen sulit membedakan antara produk resmi dan produk ilegal.

³²Ratna Wulandari. "Inovasi Teknologi dalam Sistem Pengawasan Barang: Transformasi Digital di Korea Selatan". *Jurnal Teknologi dan Kepabeanan* 9, no. 3 (2022): 17-19.

Dalam menangani dampak ekonomi dari peredaran produk ilegal, Korea Selatan telah menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dengan memperketat regulasi terhadap aliran uang yang terkait dengan perdagangan ilegal. Setiap transaksi perdagangan yang mencurigakan akan diawasi oleh otoritas keuangan, dan sistem pelaporan transaksi mencurigakan telah diterapkan secara efektif untuk mencegah pencucian uang yang berkaitan dengan perdagangan produk ilegal. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk tidak hanya menindak produk ilegal itu sendiri, tetapi juga membongkar jaringan keuangan yang mendukung perdagangan ilegal.

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menangani aspek keuangan dari perdagangan ilegal, terutama karena masih adanya praktik keuangan informal yang sulit untuk diawasi oleh pemerintah. Banyak transaksi perdagangan ilegal yang dilakukan dengan sistem pembayaran tunai atau melalui jalur perbankan yang tidak memiliki sistem deteksi transaksi mencurigakan yang optimal. Hal ini membuat sulit bagi otoritas keuangan untuk melacak aliran dana yang terkait dengan perdagangan produk ilegal, sehingga menyulitkan proses hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan ilegal.

Pembahasan lebih lanjut mengenai perbandingan penerapan produk ilegal antara Indonesia dan Korea Selatan memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek yang belum dibahas sebelumnya. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi peredaran produk ilegal adalah efektivitas sistem bea cukai dan peran institusi penegak hukum dalam kedua negara. Sistem bea cukai merupakan garis pertahanan pertama dalam mencegah masuknya produk ilegal ke dalam suatu negara.³³ Korea Selatan memiliki sistem bea cukai yang sangat terstruktur dengan menggunakan teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan (AI) dan pemindaian berbasis big data untuk mendeteksi potensi masuknya produk ilegal. Mereka menerapkan sistem verifikasi otomatis yang mampu membandingkan data produk yang masuk dengan daftar barang yang telah mendapat izin, sehingga setiap ketidaksesuaian dapat segera ditindaklanjuti.

Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan sistem bea cukai yang efektif. Meskipun telah ada upaya untuk menerapkan sistem digitalisasi dalam pengawasan impor, masih banyak kasus di mana produk ilegal berhasil masuk melalui celah-celah regulasi yang belum sepenuhnya tertutup. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan infrastruktur di pelabuhan-pelabuhan kecil dan daerah perbatasan yang sering menjadi titik masuk utama produk ilegal. Banyaknya pelabuhan tidak resmi atau jalur perdagangan yang tidak terawasi dengan baik membuat pengawasan menjadi lebih sulit, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia di setiap titik masuk barang.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perbedaan dalam kebijakan terkait perdagangan lintas batas yang mempengaruhi masuknya produk ilegal. Korea Selatan memiliki sistem perdagangan yang lebih tertutup dalam arti bahwa regulasi terhadap produk impor sangat ketat dan hanya produk yang memenuhi standar tertentu yang dapat masuk ke pasar domestik. Pemerintah Korea Selatan juga bekerja sama dengan berbagai negara untuk memastikan bahwa produk yang diekspor ke negaranya telah melalui proses seleksi yang ketat dan memenuhi standar internasional.

³³Rizky Firmansyah. "Analisis Komparatif Efektivitas Sistem Bea Cukai di Negara-negara ASEAN dan Asia Timur." *Jurnal Pabean dan Fiskal* 11, no. 2 (2021): 11-13.

Sebaliknya, Indonesia memiliki sistem perdagangan yang lebih terbuka dengan banyaknya produk impor yang masuk ke pasar tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini menyebabkan produk ilegal lebih mudah untuk masuk ke dalam negeri, terutama melalui jalur perdagangan yang belum sepenuhnya terkontrol. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah masih adanya ketidakseimbangan dalam regulasi perdagangan internasional yang membuat produk ilegal dari negara lain lebih mudah untuk masuk ke Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki regulasi yang lebih ketat seperti Korea Selatan.³⁴

3.2 Perbandingan Penegakan Hukum Peredaran Produk Ilegal antara Indonesia dan Korea Selatan

Penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas kebijakan terhadap produk ilegal. Korea Selatan memiliki sistem hukum yang tegas dalam menangani pelanggaran perdagangan ilegal. Hukuman yang diberikan kepada pelaku perdagangan ilegal di negara tersebut sangat berat, baik dalam bentuk denda yang besar maupun hukuman penjara yang dapat memberikan efek jera. Selain itu, sistem peradilan di Korea Selatan juga lebih transparan dan efisien dalam menangani kasus-kasus terkait produk ilegal. Sebaliknya, di Indonesia masih terdapat banyak kelemahan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal. Banyak pelaku bisnis ilegal yang lolos dari hukuman atau hanya mendapatkan sanksi ringan yang tidak cukup memberikan efek jera.³⁵ Praktik korupsi dalam sistem juga menjadi salah satu faktor yang membuat pemberantasan produk ilegal menjadi lebih sulit dilakukan secara efektif.

Peredaran produk ilegal merupakan permasalahan serius yang mengancam stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, serta keamanan konsumen di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Korea Selatan. Dalam konteks ini, perbandingan penegakan hukum terhadap produk ilegal di kedua negara menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti struktur hukum, budaya hukum, kapasitas lembaga pengawas, serta kesadaran masyarakat. Di Indonesia, meskipun sudah terdapat berbagai peraturan yang melarang peredaran produk ilegal seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga peraturan sektoral dari BPOM dan Bea Cukai, dalam praktiknya masih banyak celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha nakal untuk memasarkan produk ilegal, baik itu kosmetik tanpa izin edar, obat palsu, makanan tidak layak konsumsi, hingga barang elektronik tanpa sertifikasi. Penegakan hukum di Indonesia seringkali terbentur oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, serta masih tingginya tingkat korupsi yang merusak integritas sistem pengawasan. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang rendah serta

³⁴ David A. P.. "Analisis Daya Saing dan Determinan Aliran Perdagangan Komoditas Logam dan Turunannya (HS 7404) Indonesia ke Korea Selatan". *Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember*.

³⁵ Melina Gabriela W.. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 1 (2022): 34-43.

kecenderungan untuk mencari produk murah tanpa memperhatikan legalitas dan keamanan produk turut memperparah situasi ini.³⁶

Sebaliknya, Korea Selatan dikenal memiliki sistem regulasi dan penegakan hukum yang jauh lebih ketat dan efektif dalam mengatasi peredaran produk ilegal. Negara ini memiliki kerangka hukum yang terintegrasi dengan lembaga-lembaga pengawasan seperti Korea Food and Drug Administration (KFDA), Korean Customs Service, serta sistem peradilan yang transparan dan tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga lebih tinggi, yang tidak lepas dari keberhasilan pemerintah Korea Selatan dalam membangun budaya hukum melalui pendidikan, sosialisasi, serta penerapan sanksi yang konsisten. Pemerintah Korea juga menerapkan teknologi digital dalam pengawasan distribusi produk, seperti sistem pelacakan barcode dan database produk legal yang dapat diakses publik, sehingga mempermudah identifikasi dan pelaporan produk ilegal. Keberhasilan ini juga didukung oleh kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem konsumsi yang sehat dan transparan.³⁷

Di samping itu, di Korea Selatan, pemerintah memiliki pendekatan yang lebih tegas dalam menangani kasus perdagangan ilegal dengan menerapkan hukuman yang berat bagi pelaku yang terlibat. Setiap pelanggaran terhadap regulasi perdagangan dapat dikenakan denda besar atau bahkan hukuman pidana yang cukup berat.³⁸ Hal ini menciptakan efek jera yang kuat bagi pihak-pihak yang mencoba memasukkan produk ilegal ke pasar domestik. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur sanksi bagi pelaku perdagangan ilegal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus di mana pelaku hanya mendapatkan sanksi ringan atau bahkan tidak dikenai hukuman sama sekali karena lemahnya penegakan hukum.³⁹ Oleh karena itu, salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan terhadap produk ilegal adalah memperkuat penegakan hukum serta memastikan bahwa setiap pelanggar mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk memahami lebih dalam mengenai perbedaan penegakan hukum atas produk ilegal antara Indonesia dan Korea Selatan, perlu ditinjau berbagai aspek yang melatarbelakangi fenomena ini, termasuk faktor historis, kebijakan pemerintah, tingkat kesadaran masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan barang ilegal di kedua negara. Produk ilegal sendiri mencakup berbagai jenis barang, mulai dari obat-obatan, kosmetik, pakaian, barang elektronik, hingga makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan.⁴⁰ Fenomena ini tidak hanya berdampak pada industri lokal tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian secara

³⁶ Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59-80.

³⁷ Grace Permatasari., & Adit Nugroho. (2023). Komparasi Peraturan Standar Mutu Tabir Surya yang Diperjualbelikan Antara Korea Selatan dan Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 496-508.

³⁸ Dian Permana. "Komparasi Sanksi Hukum terhadap Pelaku Perdagangan Ilegal di Negara-negara Asia Timur." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2021): 15-33.

³⁹ Taufik Widodo. "Analisis Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi dalam Penanganan Produk Ilegal di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik* 12, no. 3 (2023): 10-28.

⁴⁰ Arif Widodo dan Sinta Purnama. *Pemetaan Produk Ilegal di Pasar Indonesia dan Asia Timur* (Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada, 2020), 45-67.

keseluruhan, baik dalam aspek perpajakan, persaingan usaha, maupun perlindungan konsumen.

Dari sisi penegakan hukum, pemerintah Korea Selatan melakukan investigasi mendalam terhadap jaringan perdagangan ilegal untuk memastikan bahwa tidak hanya pelaku utama yang dihukum, tetapi juga seluruh jaringan distribusi yang terkait dengan peredaran produk ilegal. Selain itu, Korea Selatan juga memiliki sistem pelaporan masyarakat yang memungkinkan warga melaporkan adanya peredaran barang ilegal dengan cepat dan aman.

Indonesia, di sisi lain, masih menghadapi kendala dalam hal penegakan hukum yang konsisten. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur sanksi terhadap perdagangan produk ilegal, implementasinya masih sering kali lemah akibat berbagai faktor, termasuk korupsi, keterbatasan kapasitas penegakan hukum, serta rendahnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab. Banyak kasus perdagangan produk ilegal yang berakhir dengan hukuman ringan atau bahkan tidak berujung pada penindakan hukum sama sekali karena kurangnya bukti atau lemahnya investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap peraturan juga masih menjadi tantangan, terutama di sektor perdagangan informal yang sulit diawasi oleh pemerintah.

Perbedaan lain yang cukup signifikan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani produk ilegal adalah kebijakan terkait sertifikasi dan pengawasan kualitas barang. Korea Selatan memiliki standar yang sangat ketat terkait produk yang beredar di pasaran, di mana setiap produk harus melalui serangkaian uji kualitas dan memperoleh sertifikasi sebelum dapat dijual secara legal. Misalnya, dalam industri kosmetik dan farmasi, setiap produk harus mendapatkan persetujuan dari otoritas kesehatan setempat, seperti Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea (MFDS). Produk yang tidak memiliki sertifikasi resmi akan langsung ditarik dari pasaran dan pelaku yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi berat.

Sebaliknya, di Indonesia, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur standar produk, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Produk ilegal sering kali masuk ke pasar tanpa melalui uji kelayakan dan tidak memiliki izin resmi, namun tetap dapat diperjualbelikan secara bebas karena lemahnya sistem pengawasan. Salah satu contohnya adalah peredaran obat-obatan tanpa izin yang sering kali ditemukan di pasar gelap atau bahkan di toko-toko daring yang kurang terawasi. Masalah ini semakin diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membeli produk yang telah memiliki izin resmi, sehingga banyak konsumen yang tetap membeli barang ilegal tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan yang ditimbulkan.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kelengkapan aturan atau kerasnya hukuman, tetapi juga pada konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Di Indonesia, tantangan ekonomi seperti tingginya angka pengangguran dan lemahnya daya beli masyarakat mendorong konsumsi produk ilegal yang lebih murah, sementara sektor informal yang besar menyulitkan kontrol distribusi barang secara menyeluruh. Di sisi lain, Korea Selatan yang memiliki sistem ekonomi lebih maju dan struktur pasar yang lebih terorganisir memungkinkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih sistematis. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam hal penerapan regulasi terhadap produk ilegal bukan hanya soal perbedaan hukum tertulis,

tetapi juga perbedaan dalam infrastruktur kelembagaan, kapasitas pengawasan, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan yang ada. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengendalian produk ilegal, Indonesia tidak hanya perlu memperbaiki regulasi dan meningkatkan penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya konsumsi produk legal, memperkuat kapasitas lembaga pengawas, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih bersih dan responsif terhadap masalah perdagangan ilegal.

Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana pendekatan strategis yang digunakan oleh masing-masing negara dalam menanggulangi produk ilegal berperan dalam membentuk efektivitas keseluruhan sistem pengawasannya. Korea Selatan, misalnya, tidak hanya mengandalkan pendekatan represif berupa penindakan dan hukuman, tetapi juga mengedepankan strategi pencegahan dan edukasi publik. Pemerintah Korea secara aktif melakukan kampanye kesadaran konsumen melalui media massa dan institusi pendidikan mengenai bahaya penggunaan produk ilegal, terutama di sektor kesehatan dan kecantikan yang sangat sensitif. Pendekatan preventif ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi tinggi, seperti big data dan kecerdasan buatan, dalam memantau distribusi produk dan menganalisis pola transaksi mencurigakan. Di pasar daring (e-commerce), Korea Selatan memiliki sistem penyaringan otomatis dan pengawasan ketat untuk mencegah penjualan produk ilegal, serta memperkuat tanggung jawab platform digital untuk ikut menjaga legalitas barang yang dijual. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun ada upaya untuk mengikuti perkembangan ini dengan memperkuat pengawasan digital melalui kerja sama dengan platform e-commerce dan media sosial, pelaksanaannya belum konsisten dan belum menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat pengawasan dan memiliki keterbatasan infrastruktur.⁴¹

Lebih lanjut, dalam konteks peran kelembagaan, institusi di Korea Selatan cenderung memiliki kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih, sehingga alur penindakan terhadap pelanggaran hukum dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Koordinasi antara lembaga seperti bea cukai, polisi, dan otoritas pengawas produk berjalan dengan baik karena adanya sistem data terintegrasi dan SOP (Standard Operating Procedure) yang ketat. Sementara itu, di Indonesia, lemahnya integrasi antarinstansi seringkali menyebabkan proses penindakan menjadi lambat, bahkan berujung pada saling lempar tanggung jawab. Contohnya, dalam kasus produk farmasi ilegal, BPOM kadang terkendala dalam melakukan penarikan produk karena minimnya dukungan dari aparat penegak hukum di daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa kelembagaan yang kuat dan sistem yang terkoordinasi sangat menentukan keberhasilan regulasi. Perbedaan kapasitas kelembagaan ini juga turut diperparah oleh minimnya anggaran dan pelatihan SDM di Indonesia, yang membuat pengawasan tidak optimal, terlebih di wilayah-wilayah perbatasan yang rawan penyelundupan.⁴²

⁴¹Tiara Patikasari. *Pelindungan Hukum Bagi Korban Deepfake Pornografi (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁴² Mansyur Alamin. (2023). *Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri Studi Terhadap Hukum Import Di Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Aspek politik dan birokrasi juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Di Korea Selatan, reformasi birokrasi dan sistem antikorupsi yang ketat telah menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Transparansi anggaran, akuntabilitas pejabat publik, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan membuat sistem regulasi menjadi lebih efektif. Di Indonesia, praktik korupsi masih menjadi batu sandungan besar dalam penerapan hukum, termasuk dalam kasus pengawasan produk ilegal. Ada banyak laporan mengenai oknum yang menerima suap untuk meloloskan izin edar atau menutup mata terhadap peredaran barang-barang tak berizin. Ini menunjukkan bahwa reformasi struktural dalam pemerintahan dan lembaga penegakan hukum adalah prasyarat utama untuk menciptakan sistem yang mampu mengatasi persoalan produk ilegal secara menyeluruh.⁴³

Dengan melihat keseluruhan perbandingan ini, nampak bahwa perbedaan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam menangani produk ilegal tidak hanya berasal dari isi regulasinya, tetapi juga dari cara sistem sosial, politik, dan teknologi mendukung penerapan regulasi tersebut. Untuk mencapai efektivitas yang lebih baik, Indonesia perlu belajar dari praktik-praktik baik Korea Selatan dalam membangun sistem pengawasan yang modern, membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan partisipasi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Reformasi hukum harus disertai dengan reformasi budaya hukum masyarakat dan pemberdayaan teknologi sebagai alat utama pengawasan. Dengan begitu, perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas pasar domestik dapat terjamin, serta Indonesia mampu bersaing dalam pasar global dengan menjunjung tinggi prinsip legalitas dan etika bisnis.⁴⁴

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pada penulisan ini pertama, Perbandingan penerapan produk ilegal antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan signifikan dalam berbagai aspek, di mana Korea Selatan memiliki keunggulan dengan sistem regulasi yang lebih ketat berbasis teknologi canggih dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap produk legal, kebijakan perlindungan industri lokal yang efektif, serta kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan media dan *platform e-commerce* untuk mengendalikan peredaran produk ilegal. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan berupa lemahnya implementasi regulasi, keterbatasan infrastruktur pengawasan, kendala dalam penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat yang lebih mengutamakan harga murah daripada legalitas produk, kurangnya kebijakan perlindungan industri lokal yang komprehensif, serta pengawasan yang belum optimal pada platform perdagangan daring. Kedua, Penegakan hukum terhadap peredaran produk ilegal di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan yang mencolok. Korea Selatan memiliki regulasi yang lebih komprehensif dan sistematis, dengan

⁴³ Celin Serfiyani dan Inggrit Hariyani. (2020). Pelindungan hukum terhadap minuman alkohol tradisional khas Indonesia (Legal protection towards Indonesian traditional alcoholic beverages). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 11(2), 267-287.

⁴⁴ Risa Saraswati, Arya Gunawati, & Agus, D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Susu "Binggrae" Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF). *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 49-62.

penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Pemerintah Korea Selatan secara rutin melakukan inspeksi dan penindakan terhadap pelanggaran, serta memiliki mekanisme pelaporan yang transparan. Di sisi lain, penegakan hukum di Indonesia sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, serta masalah infrastruktur dan sumber daya. Dengan demikian, meskipun kedua negara memiliki regulasi yang bertujuan untuk mengatasi peredaran produk ilegal, efektivitas penegakan hukum di Korea Selatan jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atsar, Abdul dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: DEEPUBLISH. (2019).
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. (2015).
- Gunawan, W., & Yani, A. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Cetakan Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. (2018).
- Miru, Ahmadi, Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2015).
- Muthiah, A. *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. (2018).
- Nasrullah, R. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. (2017).
- Panjaitan, H. *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara. (2021).
- Purwati, A. *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing. (2020).
- Rosmawati. *Pokok – Pokok Perlindungan Konsumen*. Depok: PrenadaMedia Group. (2018).
- Widiarty, Wiwik Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: PT. Komodo Books. (2016).
- Wulandari, Andi Sri Rezky, and Nurdianyana Tadjuddin. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media. (2018).
- Wuria, Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (2015).

Jurnal

- Alamin, M. S. *Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri Studi Terhadap Hukum Import Di Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). (2023).
- Astikasari, R. N. "Perlindungan Hukum Atas Merek Kosmetik Antara Indonesia Dan Korea Selatan". (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). (2024).
- Brillianty, Reza Julieta. "Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura." *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* (2023): 1-15.

- Daud, Brian Septiadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 59-80.
- Firmansyah, Rizky. "Analisis Komparatif Efektivitas Sistem Bea Cukai di Negara-negara ASEAN dan Asia Timur." *Jurnal Pabean dan Fiskal* 11, no. 2 (2021): 13-32.
- Gondokesumo, Marisca Evalina, and Nabbilah Amir. "Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)." *Perspektif Hukum* (2021): 274-290.
- Gunawan, Hendra. "Sistem Verifikasi Penjual dalam Platform E-commerce: Pelajaran dari Negara-negara Asia Timur." *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Digital* 5, no. 3 (2021): 17-19.
- Handayani, Putri. "ransformasi Peredaran Barang Ilegal di Era Digital: Tantangan Regulasi E-commerce di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis dan Teknologi* 11, no. 2 (2022): 87-105.
- Hartono, Budi. "Efektivitas Penerapan Sanksi Berat dalam Mengurangi Tingkat Kejahatan." *Jurnal Komunikasi dan Pembangunan* 9, no. 1 (2023): 75-92.
- Kusuma, Indra. "Efektivitas Kampanye Edukasi Anti-Produk Ilegal di Negara-Negara Asia." *Jurnal Komunikasi dan Pembangunan* 8, no. 2 (2023): 75-92.
- Nurchahyo, Marsanto Adi, and Aditya Subur Purwana. "Dampak Penerapan Bea Masuk Anti-Dumping Atas Impor Produk Tinplate." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 4, no. 1 (2020).
- Panggabean, A. S. D., Bondar, L. A. S., Tampubolon, P. M., Silalahi, J. A., & Anggusti, M. "Perbandingan Hukum Usaha Jasa Titip: Perspektif Hukum Bisnis Indonesia dan Thailand". *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 37-57.
- Patikasari, T. *Pelindungan Hukum Bagi Korban Deepfake Pornografi (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Permatasari, Gabriella Angelina, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Komparasi Peraturan Standar Mutu Tabir Surya yang Diperjualbelikan Antara Korea Selatan dan Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 496-508.
- Permatasari, Gabriella Angelina, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Komparasi Peraturan Standar Mutu Tabir Surya yang Diperjualbelikan Antara Korea Selatan dan Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 496-508.
- Prajogo, Wisnu, and Edi Purwanto. "The influence of advertising appeals on viral advertising, brand awareness, and purchase intention: The moderator role of hedonic personality." *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen* 17, no. 1 (2020): 19-34.
- Pramudya, Ratih. "Kesadaran Konsumen dan Preferensi Produk Legal: Pengaruh Tingkat Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 14, no. 3 (2021): 215-230.
- Qona'ah, Siti, and Heri Afianto. "Strategi BPOM dalam upaya mengatasi pemberantasan dan penyalahgunaan obat ilegal melalui gerakan "waspada obat ilegal". " *Journal Komunikasi* 11, no. 1 (2020): 43-50.

- Ruhpinesthi, Garuda Era, and Muhammad Hamzah Al Faruq. "Menguji Possibilitas Transplantasi Variasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Indonesia (Studi Perbandingan di Kolombia, Brazil, Korea Selatan, dan Turki)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol 23, no. 4 (2023): 433-454.
- Salsabila, Alkaina, and Ahmad Zakie Mubarrok. "Analisis Penyelundupan Pajak Kepabeanan Atas Importasi Merchandise K-Pop Pada Komunitas Autobase X Twitter." *Jurnal Riset Akuntansi Politala* 7, no. 2 (2024): 485-498.
- Saraswati, RA Ratna Juwita Dewi, Anne Gunawati, and Dede Agus. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Minuman Susu "Binggrae" Berlabel Halal Korea Muslim Federation (KMF)." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 49-62.
- Ningrum, Seilvia Prasindhi, and Rudy P. Tobing. "Pengaruh Viral Marketing dan Brand Awareness Terhadap Purchase Intention Produk Skincare Brand Korea Selatan." *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2022): 174-188.
- Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani, and Citi Rahmati Serfiyani. "Pelindungan hukum terhadap minuman alkohol tradisional khas Indonesia (Legal protection towards Indonesian traditional alcoholic beverages)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 267-287.
- Suaidi, M. Z. "KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING (Studi Kasus Indonesia Dan Korea Selatan merusak sistem sosial dan keuangan global)". *Taqorrub: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah* 1, no. 1 (2020): 68-91.
- Sulistiyowati, Endang. "Modernisasi Sistem Pelacakan Produk dalam Pengawasan Bea Cukai: Studi Kasus Korea Selatan dan Implementasi Potensial di Indonesia." *Jurnal Kepabeanan Indonesia* 7 no. 1 (2022): 45-63.
- Tanor, Susana Caoline Eunike. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Produk Impor Ilegal Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Crimen* 6, no. 9 (2017).
- Wijaya, Anita Permata. "Kebijakan Selektif Impor dan Dampaknya terhadap Kualitas Produk yang Beredar: Belajar dari Korea Selatan." *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Perdaganga* 15, no. 2 (2023): 112-128.
- Yulianti, Dewi. "Strategi Penguatan Penegakan Hukum dalam Mengatasi Peredaran Barang Ilegal: Pendekatan Komprehensif untuk Indonesia." *Jurnal Reformasi Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2022): 165-182.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Permasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.